**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA**

**TAHUN 2021**

**KECAMATAN REMBANG**

**KABUPATEN REMBANG**

LAMPIRAN…….

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR…….TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN REMBANG**

**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang disusun rah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2021 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA perubahan) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD Perubahan) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Perubahan Provinsi dan APBN Perubahan.

Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan mengimplementasikan mengendalikan dan mengevaluasi capaiaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rancangan Perubahan Renja terdiri dari tahap persiapan, Penyusunan Rancangan Awal, Perumusan Rancangan Akhir dan Tahapan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renncana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester I tahun 2021 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja semester I pada Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021. Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Gambar 1.1

**PERENCANAAN**

**PENGANGGARAN**

*dijabarkan*

*diperhatikan*

*diperhatikan*

*dijabarkan*

*pedoman*

*pedoman*

*pedoman*

*bahan pedoman bahan pedoman*

Renja PD

*pedoman pedoman*

*pedoman*

DPA PD

RKA PD

Renstra PD

APBD

RAPBD

KUA & PPAS

RKPD

RPJMD

RPJPD

RKP

RPJMN

Gambar 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Prinsip Penyusunan perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2021 :

1. Substansi Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang merupakan perbaikan dari materi Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dilakukan dalam rangka reformulasi pencapaian target yang telah ditetapkan dan sebagai tindaklanjut atas evaluasi triwulan II/semester I Dokumen Renja Kecamatan Rembang tahun 2021.
3. Terkait hal pendanaan pasca refocusing penanganan covid-19 yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan perubahan renja adalah :
4. Memperioritaskan pendanaan yang bersifat mandatory spanding yang belum tersedia pada anggaran induk sebagai akibat refocusing;
5. Memprioritaskan pendanaan untuk pekerjaan yang bersifat mengikat dan/atau sudah dilaksanakan namun tidak tersedia anggaran karena refocusing.

4. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang diusulkan.

5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerjakeluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

6. Perubahan Renja Kecamatan Rembang merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan diaksanakan dalam tahun 2021 dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perubahan setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KPUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan).

* 1. **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Rembang nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
	1. **Maksud dan Tujuan**

**1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang di Tahun 2021, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang secara berkesinambungan

**1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2021 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Renja semester I Tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran maupun Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran (KUPA -PPAS) Tahun 2021 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RAPBD) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2021.
	1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

 BAB II : Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

BAB IV : Penutup.

**BAB II**

**Hasil Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021**

**Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang**

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Agar dokumen Rencana Kerja yang disusun berkualitas maka diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 sampai dengan semester satu. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu tahun 2021, yang sudah menyesuaikan dengan Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

* 1. **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester I Tahun 2021 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2016-2021 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu tahun 2021 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja**

**Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang**

**s/d Triwulan II (Semester 1)**

**Tahun 2021**

| no | Program Prioritas | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target akhir Renstra PD pada Tahun 2016 s/d 2021 | **Target Kinerja Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2021) yang di evaluasi** | Realisasi Kinerja pada Triwulan | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2021 yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021 | Tingkat capaian kinerja renstra PD s/d tahun 2021 | Predikat | OPD Penanggung Jawab | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **II** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **9** | **10** | **11** | **14=10+11+12+13** | **15=14/9\*100** | **16=14+8** | **17=16/7\*100** | **18** | **19** | **20** |
| **K** | **Rp.** | **K** | **Rp. Renja** | **K** | DPA SEBELUM PERUBAHAN(Rp) | DPA SETELAH PERUBAHAN(Rp) | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** |
| **7** |  |  | **KECAMATAN REMBANG** |  |  |  |  |  | **13.108.090.000** |  | **13.108.090.000** | **10.315.821.500** |  | 0 |  | 3.862.458.198 |  | 3..862.458.198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |   | **KECAMATAN REMBANG** |  |   |   |   |  | **13.108.090.000** |   | **13.108.090.000** | **10.315.821.500** |   | 0  |  |  3.862.458.198 |   | **3.862.458.198** |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **7.01** |  |  | **Administrasi Pemerintahan ( Kecamatan )** |  |   |   |   |  | **13.108.090.000** |   | **13.108.090.000** | **10.315.821.500** |   |  0 |  |  3.862.458.198 |   | 3..862.458.198 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **401.7** | **01. Program ReformasiBirokrasi** | Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota**  | Prosentase ketercapain Pelayanan administrasi umum | % | 100 |   | 100 | **7.042.404.000** |  90 | **7.042.404.000** | **6.954.205.500** |  | 0 |  | 3.127.752.446 |  | 3.147.554.446 |  |  |  |  |  |  |   | **Kecamatan REMBANG** |   |
| 7.1.01.2.01 |   |  | **Perencanaa, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**  | Presentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | % | 100 |   |  100 | **38.900.000** |  100 | **38.900.000** | **38.900.000** |  | 0 |  | 25.185.750 |  | 25.185.750 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.01.01 |   |  | Penyususnan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah | Prosentase Sarana dan Prasarana Aaparatur dalam kondisi baik | % | 100 |   |  100  |  | 100 | **16.900.000** | **16.900.000** |  | 0 |  | 14.099.000 |  | 14.099.000 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.01.02 |  |  | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD |  | % | 100 |   |  100  |  | 100 | **10.000.000** | **10.000.000** |  | 0 |  | 5.886.750 |  | 5.886.750 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.01.07 |  |   | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*  | *Tercapainya Fasilitas Yang memadahi kantor Kecamatan Rembang*  | % |   |   |  90  |  |   | **12.000.000** | **12.000.000** |  | 0 |  | 5.200.000 |  | 5.200.000 |  |  |  |  |  |  |   | **Kecamatan REMBANG** |   |
| 7.1.01.2.02 |   |   | **Administrasi keuangan Perangkat Daerah** |  | % | 100 |   |  100  |  |  100 | **6.339.885.000** | **6.156.988.000** |  | 0 |  |  3.023.813.318 |  | 3.023.813.318 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.02.01 |   |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | % | 100 |  |  100  |  |  100  | **6.210.635.000** | **6.029.778.000** |  | 0 |  | 3.023.463.318 |  | 3.023.463.318 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.02.03 |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD |  | % |   | ... |  100 |  |  65 | **123.600.000** | **121.560.000** |  | 0 |  | 350.000 |  | 350.000 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** |   |
| 7.1.01.2.02.05 |   |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD |  | % | 100 |  |  100 |  |  100 | **5.650.000** | **5.650.000** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.05 |   |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** |  | % | 100 |   |  100  |  |  100  | **50.000.000** | **50.000.000** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.05.02 |   |  | Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya |  | % |  |  |  |  |  | **50.000.000** | **50.000.000** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.06 |   |  | **Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah**  |  | % |  |  |  |  |  | **168.500.000** | **164.218.500** |  | 0 |  | 20.940.000 |  | 20.940.000 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.06.01 |  |  | Penyediaan Kpmponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor  |  | % |  |  |  |  |  | **4.000.000** | **4.000.000** |  | 0 |  | 1.120.000 |  | 1.120.000 |  |  |  |  |  |  |   | **Kecamatan REMBANG** |   |
| 7.1.01.2.06.02 |  |  | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor  |  | % |  |  |  |  |  | **75.000.000** | **93.379.400** |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |   | **Kecamatan REMBANG** |   |
| 7.1.01.2.06.03 |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |  | % |  |  |  |  |  | **4.000.000** | **8.139.100** |  | 0 |  | 1.300.0000 |  | 1.300.0000 |  |  |  |  |  |  |   | **Kecamatan REMBANG** |   |
| 7.1.01.2.06.04 |   |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  | % |  |  |  |  |  | **40.000.000** | **30.000.000** |  | 0 |  | 8.893.000 |  | 8.893.000 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.06.05 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penganggaran  |  |  |  |  |  |  |  | **7.500.000** | **7.500.000** |  | 0 |  | 3.377.000 |  | 3.377.000 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** |   |
| 7.1.01.2.06.06 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang **–** undangan |  |  |  |   |  |  |   | **3.000.000** | **3.000.000** |  | 0 |  | 780.000 |  | 780.000 |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 7.1.01.2.06.07 |  |  | Penyediaan Bahan / Material  |  |  |  |   |  |  |   | **15.000.000** | **15.000.000** |  | 0 |  | 5.350.000 |  | 5.350.000 |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 7.1.01.2.06.09 |  |   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |  |  |  |  |   | **20.000.000** | **3.200.000** |  | 0 |  | 120.000 |  | 120.000 |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 7.1.01.2.08 |   |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  |  | % |  |  |  |  |  | **163.000.000** | **161.980.000** |  | 19.802.000 |  | 41.345.288 |  | 61.147.288 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.08.01 |   |  | Penyediaan Jasa surat menyurat  |  | % |  |  |  |  |  | **3.000.000** | **3.000.000** |  | 0 |  | 850.000 |  | 850.000 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.08.02 |   |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  | % |  |  |  |  |  | **35.000.000** | **35.000.000** |  | 0 |  | 9.592.288 |  | 9.592.288 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.08.04 |   |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  | % |  |  |  |  |  | **125.000.000** | **123.980.000** |  | 19.802.000 |  | 30.903.000 |  | 50.705.000 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.09 |   |  | **Pemeliharaan Barang Milim daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** **daerah**  |  | % |  |  |  |  |  | **282.119.000** | **382.119.000** |  | 0 |  | 16.468.090 |  | 16.468.090 |  |  |  |  |  |  |  | **Kecamatan REMBANG** | ... |
| 7.1.01.2.09.01 |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000.000 | 30.000.000 |  | 0 |  | 3.053.400 |  | 3.053.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.01.2.09.06 |  |  | pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000.000 | 25.000.000 |  | 0 |  | 2.430.000 |  | 2.430.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.01.2.09.09 |  |  | pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya  |  |  |  |  |  |  |  | 227.119.000 | 327.119.000 |  | 0 |  | 10.984.690 |  | 10.984.690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.02 |  |  | **Program penyelenggaraan pemerintahan Dan pelayanan Publik** |  |  |  |  |  |  |  | **269.000.000** | **163.925.000** |  | 0 |  | 23.148.000 |  | 23.148.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.02.2.04 |  |  | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat  |  |  |  |  |  |  |  | **269.000.000** | **163.925.000** |  | 0 |  | 23.148.000 |  | 23.148.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.02.2.04.01 |  |  | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000.000 | 53.575.000 |  | 0 |  | 15.525.000 |  | 15.525.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.02.2.04.03 |  |  | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait kewenangan lain yang di limpahkan  |  |  |  |  |  |  |  | 229.000.000 | 110.350.000 |  | 0 |  | 7.623.000 |  | 7.623.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.03 |  |  | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**  |  |  |  |  |  |  |  | **5.596.686.000** | **2.906.691.000** |  | 0 |  | 56.590.000 |  | 56.590.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.03.2.01 |  |  | koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |  |  |  |  |  |  |  | **135.000.000** | **135.000.000** |  | 0 |  | 56.590.000 |  | 56.590.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.03.2.01.01 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Desa  |  |  |  |  |  |  |  | 135.000.000 | 126.395.000 |  | 0 |  | 56.590.000 |  | 56.590.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.03.2.01.03 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan  |  |  |  |  |  |  |  | 135.000.000 | 126.395.000 |  | 0 |  | 56.590.000 |  | 56.590.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.1.03.2.02** |  |  | **Kegiatan Pemberdayaan kelurahan**  |  |  |  |  |  |  |  | **5.461.686.000** | **2.780.296.000** |  | **51.640.000** |  | **450.520.752** |  | **502.160.752** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.03.2.02.01 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Kelurahan  |  |  |  |  |  |  |  | 38.764.400 | 18.193.140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.03.2.02.02 |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  |  |  |  |  |  | 2.376.682.420 | 609.026.815 |  | 0 |  | 35.509.000 |  | 35.509.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.03.2.02.03 |  |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  |  |  |  |  |  | 1.635.521.750 | 786.118.135 |  | 0 |  | 106.693.600 |  | 106.693.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.03.2.02.04 |  |  | Evaluasi Kelurahan |  |  |  |  |  |  |  | 1.410.717.430 | 1.366.957.910 |  | 51.640.000 |  | 308.318.152 |  | 359.958.152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.04 |  |  | **Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum**  |  |  |  |  |  |  |  | **85.000.000** | **148.700.000** |  | 0 |  | 18.200.000 |  | 18.200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.04..2.03 |  |  | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum |  |  |  |  |  |  |  | **85.000.000** | **148.700.000** |  | 0 |  | 18.200.000 |  | 18.200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.04..2.03.01 |  |  | Sinegritas dengan Kepolisian NKRI, TNI dan Instasi Vertikal di Wilayah kecamatan  |  |  |  |  |  |  |  | 85.000.000 | 148.700.000 |  | 0 |  | 18.200.000 |  | 18.200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.06 |  |  | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**  |  |  |  |  |  |  |  | **115.000.000** | **142.300.000** |  | 0 |  | 36.595.000 |  | 36.595.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.06.2.01 |  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa  |  |  |  |  |  |  |  | 115.000.000 | 142.300.000 |  | 0 |  | 36.595.000 |  | 36.595.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.06.2.01.02 |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |  |  |  |  |  |  |  | 105.000.000 | 132.300.000 |  | 0 |  | 36.595.000 |  | 36.595.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.06.2.01.05 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000.000 | 10.000.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dari data sebagaimana tabel 2.1 dan diperjelas dengan tabel 2.2. tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016- 2021 sampai dengan semester satu tahun 2021 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 sampai dengan Semester Satu Tahun 2021 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
	1. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dengan 11 indikator kinerja

program, dan 33 kegiatan

* 1. Dari 11 indikator kinerja program, terdapat 10 indikator yang telah tercapai, sedangkan 1 indikator masih dalam proses pencapaian target.
	2. Dari 33 indikator kinerja kegiatan, 20 indikator telah memenuhi target. sedangkan 13 indikator masih dalam proses pencapaian target.
1. Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester I Tahun 2021 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
	1. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 5 indikator program dan 11 kegiatan dengan 33 indikator.
	2. Dari 5 indikator kinerja program, terdapat 4 indikator yang telah melampaui target, sedangkan 1 indikator masih dalam proses pencapaian target.
	3. Dari 33 indikator kinerja kegiatan, terdapat 20 indikator yang telah memenuhi target. sedangkan 13 indikator masih dalam proses pencapaian target.
	4. **Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2021**

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 setelah dilakukan Revocusing dalam memenuhi ) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2021 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sampai dengan semester I tahun 2021 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut.

**tabel 2.2**

**Realisasi Keuangan**

**Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang**

**Sampai dengan Triwulan III tahun 2021**

| **KODE REKENING**  | **NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN** |  **PAGU**  |  **REALISASI S/D TRIWULAN III TAHUN 2021** |  **SISA ANGGARAN ( 4-5)**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **INDUK 2021** |  **INDUK 2021** |  **REFOCUSING**  |  **Rp.**  |  **%**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 7 | Unsur kewilayahan  | **13.108.090.000** | **10.315.821.500** | **6.322.067.592** | **61,29** | **3.993.753.908** |
| 7.01 | Administrasi Pemerintahan ( Kemcamatan ) | **13.108.090.000** | **10.315.821.500** | **6.322.067.592** | **61,29** | **3.993.753.908** |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota | **7.042.404.000** | **6.954.205.500** | 4.498.004.340 | **64,68** | 2.456.201.160 |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaa, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38.900.000 | 38.900.000 | 26.785.750 | 68,86 | 12.114.250 |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyususnan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah | 16.900.000 | 16.900.000 | 14.099.000 | 83,43 | 2.801.000 |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.886.750 | 58,87 | 4.113.250 |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerrja Perangkat Daerah  | 12.000.000 | 12.000.000 | 6.800.000 | 56,67 | **5.200.000** |
| 7.01.01.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | **6.339.885.000** | **6.156.988.000** | **4.329.871.582** | **70,32** | **1.827.116.418** |
| 7.01.01.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.210.635.000 | 6.029.778.000 | 4.269.281.582 | 70,80 | 1.760.496.418 |
| 7.01.01.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 123.600.000 | 121.560.000 | 60.590.000 | 49,84 | 60.970.000 |
| 7.01.01.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD | 5.650.000 | 5.650.000 | 0 | 0 | 5.650.000 |
| 7.01.01.2.05 | **Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **50.000.000** | **50.000.000** | 0 | 0 | 50.000.000 |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | 50.000.000 | 50.000.000 | **0** | **0** | **50.000.000** |
| 7.01.01.2.06 | **Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah** | **168.500.000** | **164.218.500** | 31.462.000 | 19,16 | 132.756.500 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor  | 4.000.000 | 4.000.000 | **1.620.000** | **40,50** | **2.380.000** |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor  | 75.000.000 | 93.379.400 | **0** | **0** | **93.379.400** |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah tangga  | 4.000.000 | 8.139.100 | **1.950.000** | **23.96** | **6.189.100** |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 40.000.000 | 30.000.000 | 13.085.000 | 43,62 | 16.915.000 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan  | 7.500.000 | 7.500.000 | 4.347.000 | 57,96 | 3.153.000 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang **–** undangan | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.040.000 | 34,67 | 1.960.000 |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan / Material  | 15.000.000 | 15.000.000 | 7.300.000 | 48,67 | 7.700.000 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20.000.000 | 3.200.000 | 2.120.000 | 66,25 | **1.080.000** |
| 7.01.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  | 163.000.000 | 161.980.000 | 94.521.608 | 58,35 | 67.458.392 |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat menyurat  | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.450.000 | 48,33 | 1.550.000 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 35.000.000 | 35.000.000 | 12.363.608 | 35,32 | 22.636.392 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 125.000.000 | 123.980.000 | 80.708.000 | 65,10 | 43.272.000 |
| 7.01.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milim daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** **daerah**  | **282.119.000** | **382.119.000** | 15.363.400 | 4,02 | 366.755.600 |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan  | 30.000.000 | 30.000.000 | 6.233.400 | 20,78 | 23.766.600 |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | 25.000.000 | 25.000.000 | 7.130.000 | 28,52 | 17.870.000 |
| 7.01.01.2.09.09 | pemeliharaan / Rehabiltasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | 227.119.000 | 327.119.000 | 2.000.000 | 0.61 | 325.119.000 |
| 7.01.02 | **Program penyelenggaraan pemerintahan Dan pelayanan Publik** | **269.000.000** | **163.925.000** | 42.598.000 | 25,99 | 121.327.000 |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat  | 269.000.000 | 163.925.000 | 42.598.000 | 25,99 | 121.327.000 |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha  | 40.000.000 | 53.575.000 | 28.125.000 | 52,50 | 25.450.000 |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait kewenangan lain yang di limpahkan  | 229.000.000 | 110.350.000 | 14.473.000 | 13,12 | 95.877.000 |
| 7.01.03 | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**  | **5.596.686.000** | **2.906.691.000** | 942.286.962 | 32,42 | 1.964.404.038 |
| 7.01.03.2.01 | koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 135.000.000 | 126.395.000 | 83.695.000 | 66,22 | 42.700.000 |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Desa  | 135.000.000 | 126.395.000 | 83.695.000 | 66,22 | 42.700.000 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 5.461.686.000 | 2.780.296.000 | 858.591.962 | 30,88 | 1.921.704.038 |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Kelurahan  | 38.764.400 | 18.193.140 | 0 | 0 | 18.193.140 |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2.376.682.420 | 609.026.815 | 23.471.000 | 3,85 | 585.555.815 |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.635.521.750 | 786.118.135 | 298.156.150 | 37,93 | 487.961.985 |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi kelurahan | 1.410.717.430 | 1.366.957.910 | 536.964.812 | 39,28 | 829.993.098 |
| 7.01.04 | **Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum**  | **85.000.000** | **148.700.000** | 45.500.000 | 30,60 | 103.200.000 |
| 7.01.04.2.03 | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum | 85.000.000 | 148.700.000 | 45.500.000 | 30,60 | 103.200.000 |
| 7.01.04.2.03.01 | Sinegritas dengan Kepolisian NKRI, TNI dan Instasi Vertikal di Wilayah kecamatan  | 85.000.000 | 148.700.000 | 45.500.000 | 30,60 | 103.200.000 |
| 7.01.06 | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**  | **115.000.000** | **142.300.000** | 65.275.000 | 45,87 | 77.025.000 |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa  | 115.000.000 | 142.300.000 | 65.275.000 | 45,87 | 77.025.000 |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | 105.000.000 | 132.300.000 | 65.275.000 | 49,34 | 67.025.000 |
| 7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa  | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |

 Dari Tabel 2.2 menggambarkan bahwa total APBD induk Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun senilai Rp. 13.108.090.000 (berdasarkan Peraturan Bupati Rembang nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020). Namun dengan adanya kebijakan focus penganggaran APBD untuk pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI maka berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, total anggaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang setelah direfocusing menjadi Rp. 10.315.821.500 berkurang 2.792.268.500 Atau 21,30 % sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2021 senilai Rp 6.322.067.592 (61,29% )

* 1. **ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Rembang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Rembang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang Pemerintahan dalam hal ini urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.3.**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN REMBANG SEMESTER I**

**TAHUN 2021**

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

Tujuan : “Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan “

| **NO** | **INDIKATOR UTAMA** | **TARGET KINERJA** | **CAPAIAN AKHIR RPJMD** |
| --- | --- | --- | --- |
| **TH. 2021** | **TH. 2021** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78 | 82 | 82 |

**Tabel 2.3.**

**INDIKATOR KINERJA SASARAN KECAMATAN REMBANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**Tahun 2020-2021**

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

Sasaran : “Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan“

| **NO** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET KINERJA** | **CAPAIAN AKHIR RPJMD** |
| --- | --- | --- | --- |
| **TH. 2021** | **TH. 2021** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 2 | 2,30 | 2,30 |

**Tabel 2.4**

**Capaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Rembang Kab. Rembang**

**Semester 1 tahun 2021**

| **NO** | **PROGRAM** | **INDIKATOR** | **SAT** | **REALISASI KINERJA SMT I TH. 2021** | **TARGET KINERJA TH. 2021** | **CAPAIAN KINERJA TH. 2021** | **PREDIKAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota    | Prosentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja Perangkat daerah  | % | 43 | 70 | 61,4 | Akan tercapai |
| Prosentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan | % | 55 | 95 | 57,8 | Akan tercapai |
| Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum | % | 35 | 95 | 36,8 | Akan tercapai |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | tinngkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat | Nilai | 3 | 7 | 42,8 | Tercapai |
| 3 |  Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan  | Tinglkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa  | Nilai | 3 | 7 | 42,8 | Akan Tercapai |
| 45 | Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum  Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa  | Tingkat Kinerja seksi Keterntraman dan Ketertiban  | Nilai | 3 | 7 | 42,8 | Akan tercapai |
| Tingkat Kinerja seksi Tata pemerintahan | Nilai | 2 | 7 | 28,5 | Akan tercapai |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. **Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2021**

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rembang tahun 2021 berpedoman pada Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021, dimana tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ke – 5 dengan tema Pembangunan “**Pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan**”. Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi ke-2 daerah yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”, dan Misi ke-7 daerah yaitu “Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan sektor pertanian, perindutrian dan perdagangan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, pemenuhan infrastuktur yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar terutama warga miskin, dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 harus pula memperhatikan aspek keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**BAB III**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan rancangan perubahan Renja Kecamatan Rembang yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan utamanya perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
3. Administrasi Keungan Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah
8. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
9. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di Limpahkan Kepada camat
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
13. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
15. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintashan Desa
16. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah program dan kegiatan untuk Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah sejumlah 5 program serta 12 kegiatan dan 54 pekerjaan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp. 13.108.090.000 dengan Pengurangan / Revocosing pagu anggaran senilai Rp. 2.792.268.500 dari pagu Induk Tahun 2021.

Rekapitulasi Perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2021 sebagaimana tertera dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

**REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD KAB. REMBANG TAHUN 2021**

| **NO** | **RANCANGAN AWAL RKPD 2021** | **HASIL ANALISA KEBUTUHAN** | **CATATAN PENTING** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **SAT** | **Target Capaian** | **Lokasi** | **Pagu Indikatif APBD** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **SAT** | **Target Capaian** | **Lokasi** | **Pagu Indikatif APBD** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **KECAMATAN REMBANG** |  |  | **KECAMATAN REMBANG** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Unsur kewilayahan  |  |  |  |  | **13.108.090.000** | Unsur kewilayahan  |  |  |  |  | **13.108.090.000** |  |
| 7.01 | Administrasi Pemerintahan ( Kecamatan ) |  |  |  |  | **13.108.090.000** | Administrasi Pemerintahan ( Kemcamatan ) |  |  |  |  | **13.108.090.000** |  |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota |  |  |  |  | **7.042.404.000** | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota |  |  |  |  | **7.042.404.000** |  |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaa, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  | 38.900.000 | Perencanaa, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  | 38.900.000 |  |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyususnan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah |  |  |  |  | 16.900.000 | Penyususnan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah |  |  |  |  | 16.900.000 |  |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  |  |  |  | 10.000.000 | Penyususnan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah |  |  |  |  | 10.000.000 |  |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerrja Perangkat Daerah  |  |  |  |  | 12.000.000 | Evaluasi Kinerrja Perangkat Daerah  |  |  |  |  | 12.000.000 |  |
| 7.01.01.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |  |  |  | **6.339.885.000** | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |  |  |  | **6.339.885.000** |  |
| 7.01.01.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  |  |  | 6.210.635.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  |  |  | 6.210.635.000 |  |
| 7.01.01.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD |  |  |  |  | 123.600.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD |  |  |  |  | 123.600.000 |  |
|  |
| 7.01.01.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD |  |  |  |  | 5.650.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD |  |  |  |  | 5.650.000 |  |
| 7.01.01.02.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |  |  |  |  | **50.000.000** | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |  |  |  |  | **50.000.000** |  |
| 7.01.01.02.05.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya |  |  |  |  | 50.000.000 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya |  |  |  |  | 50.000.000 |  |
| 7.01.01.2.06 | **Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah** |  |  |  |  | **168.500.000** | **Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah** |  |  |  |  | **168.500.000** |  |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  |  |  |  |  | 4.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  |  |  |  |  | 4.000.000 |  |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor  |  |  |  |  | 75.000.000 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor  |  |  |  |  | 75.000.000 |  |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |  |  |  | 4.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |  |  |  | 4.000.000 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |  |  |  | 40.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |  |  |  | 40.000.000 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penganggaran  |  |  |  |  | 7.500.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penganggaran  |  |  |  |  | 7.500.000 |  |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang **–** undangan |  |  |  |  | 3.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang **–** undangan |  |  |  |  | 3.000.000 |  |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan / Material  |  |  |  |  | 15.000.000 | Penyediaan Bahan / Material  |  |  |  |  | 15.000.000 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |  |  | 20.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |  |  | 20.000.000 |
| 7.01.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  |  |  |  |  | 163.000.000 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  |  |  |  |  | 163.000.000 |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat  |  |  |  |  | 3.000.000 | Penyediaan jasa surat menyurat  |  |  |  |  | 3.000.000 |  |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |  |  |  | 35.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |  |  |  | 35.000.000 |  |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |  |  |  | 125.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |  |  |  | 125.000.000 |  |
| 7.01.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milim daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** **daerah**  |  |  |  |  | **282.119.000** | **Pemeliharaan Barang Milim daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** **daerah**  |  |  |  |  | **282.119.000** |  |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan |  |  |  |  | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan |  |  |  |  | 30.000.000 |  |
| 7.01.01.2.09.06 | pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  |  |  |  |  | 25.000.000 | pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  |  |  |  |  | 25.000.000 |  |
| 7.01.01.2.09.09 | pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya |  |  |  |  | 227.119.000 | pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya |  |  |  |  | 227.119.000 |  |
| 7.01.02 | **Program penyelenggaraan pemerintahan Dan pelayanan Publik** |  |  |  |  | **269.000.000** | **Program penyelenggaraan pemerintahan Dan pelayanan Publik** |  |  |  |  | **269.000.000** |  |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat  |  |  |  |  | 269.000.000 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat  |  |  |  |  | 269.000.000 |  |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha  |  |  |  |  | 40.000.000 | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait kewenangan lain yang di limpahkan  |  |  |  |  | 40.000.000 |  |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait kewenangan lain yang di limpahkan  |  |  |  |  | 229.000.000 | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait kewenangan lain yang di limpahkan  |  |  |  |  | 229.000.000 |  |
| 7.01.03 | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**  |  |  |  |  | **5.596.686.000** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**  |  |  |  |  | **5.596.686.000** |  |
| 7.01.03.2.01 | koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |  |  |  |  | 135.000.000 | koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |  |  |  |  | 135.000.000 |  |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Desa  |  |  |  |  | 135.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Desa  |  |  |  |  | 135.000.000 |  |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan kelurahan**  |  |  |  |  | **5.461.686.000** | **Kegiatan Pemberdayaan kelurahan**  |  |  |  |  | **5.461.686.000** |  |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Kelurahan  |  |  |  |  | 38.764.400 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Kelurahan  |  |  |  |  | 38.764.400 |  |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan |  |  |  |  | 2.376.682.420 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan |  |  |  |  | 2.376.682.420 |  |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan |  |  |  |  | 1.635.521.750 | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan |  |  |  |  | 1.635.521.750 |  |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi kelurahan |  |  |  |  | 1.410.717.430 | Evaluasi kelurahan |  |  |  |  | 1.410.717.430 |  |
| 7.01.04 | **Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum**  |  |  |  |  | **85.000.000** | **Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum**  |  |  |  |  | **85.000.000** |  |
| 7.01.04.2.03 | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum |  |  |  |  | 85.000.000 | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum |  |  | , Tentara Nasional |  | 85.000.000 |  |
| 7.01.04.2.03.01 | Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik IIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan  |  |  |  |  | 85.000.000 | Sinegritas dengan Kepolisian NKRI, TNI dan Instasi Vertikal di Wilayah kecamatan  |  |  |  |  | 85.000.000 |  |
| 7.01.06 | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**  |  |  |  |  | **115.000.000** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**  |  |  |  |  | **115.000.000** |  |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa  |  |  |  |  | 115.000.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa  |  |  |  |  | 115.000.000 |  |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |  |  |  |  | 105.000.000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |  |  |  |  | 105.000.000 |  |
| 7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa  |  |  |  |  | 10.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |

**Tabel 3.1.**

**Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan**

**Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2021**

| **KODE REKENING**  | **NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN** | **INDIKATOR** | **TARGET** |  **PAGU**  |  **+ / (-)**  |  **ALASAN PERUBAHAN**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDUK** | **REFOCUSING** | **PERUBAHAN** |  **INDUK 20201** |  **REFOCUSING**  |  **PERUBAHAN**  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 7 | Unsur kewilayahan  |  |  |  |  | **13.108.090.000** | **10.315.821.500** | **10.315.821.500** | **- 2.792.268.500** | **Refocosing** |
| 7.01 | Administrasi Pemerintahan ( Kecamatan ) |  |  |  |  | **13.108.090.000** | **10.315.821.500** | **10.315.821.500** | **- 2.792.268.500** |  |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota |  |  |  |  | **7.042.404.000** | **6.954.205.500** | **6.954.205.500** | **- 88.198.500** |   |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaa, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  | 38.900.000 | 38.900.000 | 38.900.000 | **0** |   |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah |  |  |  |  | 16.900.000 | 16.900.000 | 16.900.000 | 0 |   |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD |  |  |  |  | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |   |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerrja Perangkat Daerah  |  |  |  |  | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |  |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |  |  |  | **6.339.885.000** | **6.156.988.000** | **6.156.988.000** | **- 182.897.000** |  |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  |  |  | 6.210.635.000 | 6.029.778.000 | 6.029.778.000 | - 180.857.000 |  |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD |  |  |  |  | 123.600.000 | 121.560.000 | 121.560.000 | -2.040.000 |  |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD |  |  |  |  | 5.650.000 | 5.650.000 | 5.650.000 | 0 |  |
| 7.01.01.02.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |  |  |  |  | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **0** |  |
| 7.01.01.02.05.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya |  |  |  |  | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |  |
| 7.01.01.2.06 | **Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah** |  |  |  |  | **168.500.000** | **164.218.500** | **164.218.500** | **- 4.281.500** |  |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  |  |  |  |  | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | * 0
 |  |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor  |  |  |  |  | 75.000.000 | 93.379.400 | 93.379.400 | 18.379.400 |  |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |  |  |  | 4.000.000 | 8.139.100 | 8.139.100 | 4.139.100 |  |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |  |  |  | 40.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | -10.000.000 |  |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penganggaran  |  |  |  |  | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |  |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang **–** undangan |  |  |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |  |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan / Material  |  |  |  |  | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | **0** |   |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |  |  | 20.000.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | **- 16.800.000** |  |
| 7.01.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  |  |  |  |  | 163.000.000 | 161.980.000 | 161.980.000 | - 1.020.000 |  |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat  |  |  |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |  |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |  |  |  | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | **0** |  |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |  |  |  | 125.000.000 | 123.980.000 | 123.980.000 | - 1.020.000 |  |
| 7.01.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milim daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** **daerah**  |  |  |  |  | **282.119.000** | **382.119.000** | **382.119.000** | **100.000.000** |  |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan |  |  |  |  | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | **0** |  |
| 7.01.01.2.09.06 | pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  |  |  |  |  | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |  |
| 7.01.01.2.09.09 | pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya |  |  |  |  | 227.119.000 | 227.119.000 | 327.119.000 | **100.000.000** |  |
| 7.01.02 | **Program penyelenggaraan pemerintahan Dan pelayanan Publik** |  |  |  |  | **269.000.000** | **163.925.000** | **163.925.000** | - 105.075.000 |  |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat  |  |  |  |  | 269.000.000 | 163.925.000 | 163.925.000 | **- 105.075.000** |  |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha  |  |  |  |  | 40.000.000 | 53.575.000 | 53.575.000 | **13.575.000** |  |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait kewenangan lain yang di limpahkan  |  |  |  |  | 229.000.000 | 110.350.000 | 110.350.000 | - 118.650.000 |  |
| 7.01.03 | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**  |  |  |  |  | **5.596.686.000** | **2.906.691.000** | **2.906.691.000** | - 2.689.995.000 |  |
| 7.01.03.2.01 | koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |  |  |  |  | 135.000.000 | 126.395.000 | 126.395.000 | **- 8.605.000** |  |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Desa  |  |  |  |  | 135.000.000 | 126.395.000 | 126.395.000 | **- 8.605.000** |  |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan kelurahan**  |  |  |  |  | **5.461.686.000** | 2.780.296.000 | 2.780.296.000 | **- 2.681.390.000** |  |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Kelurahan  |  |  |  |  | 38.764.400 | 18.193.140 | 18.193.140 | **- 20.571.260** |  |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan |  |  |  |  | 2.376.682.420 | 609.026.815 | 609.026.815 | **- 1.767.655.605** |  |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan |  |  |  |  | 1.635.521.750 | 786.118.135 | 786.118.135 | **- 849.403.615** |  |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi kelurahan |  |  |  |  | 1.410.717.430 | 1.366.957.910 | 1.366.957.910 | **- 43.759.520** |  |
| 7.01.04 | **Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum**  |  |  |  |  | **85.000.000** | **148.700.000** | **148.700.000** | **63.700.000** |  |
| 7.01.04.2.03 | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum |  |  |  |  | 85.000.000 | 148.700.000 | 148.700.000 | **63.700.000** |  |
| 7.01.04.2.03.01 | Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik IIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan  |  |  |  |  | 85.000.000 | 148.700.000 | 148.700.000 | **63.700.000** |  |
| 7.01.06 | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**  |  |  |  |  | **115.000.000** | **142.300.000** | **142.300.000** | **27.300.000** |  |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa  |  |  |  |  | 115.000.000 | 142.300.000 | 142.300.000 | **27.300.000** |  |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |  |  |  |  | 105.000.000 | 132.300.000 | 132.300.000 | **27.300.000** |  |
| 7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa  |  |  |  |  | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | **0** |  |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2021, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

* 1. **Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 antara lain :

* 1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Rembang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
	2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rembang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2021 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Rembang;
	3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rembang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2021, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
	4. **Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Rembang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021;
2. Dalam penyusunan RDPPAA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Rembang.
	1. **Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kabupaten Rembang Tahun 2021 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2021.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2021.

Rembang, Oktober 2021

CAMAT REMBANG

Drs. MUSTHOLIH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650312 199503 1 001